**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Indonesia adalah Negara Kesatuan yang biasa disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan dideklarasikan oleh para pendirinya saat kemerdekaan dengan mengklaim seluruh wilayahnya bagian dari suatu negara, negara tidak dibentuk berdasarkan kesepakatan, setelah itu baru dibentuk wilayah atau daerah di bawahnya. Kewenangan yang didapat oleh daerah merupakan pelimpahan dari pemerintah pusat untuk diatur sebagian[[1]](#footnote-1). Negara kesatuan tidak mengenal negara dalam negara, pemerintahan yang berdaulat hanya satu yakni pemerintah pusat[[2]](#footnote-2). Kekuasaan yang ada di tangan pemerintah daerah merupakan wewenang dari pusat dan tidak boleh hukum daerah bertentangan dengan hukum nasional, peraturan pusat tidak lagi memerlukan pengakuan dari daerah[[3]](#footnote-3). Sedangkan dalam mewujudkan tujuan nasional yang tercantum dalam alinea ke-4 dalam pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjelaskan bahwa Pemerintahan Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa

ikutl melaksanakan ketertibanl dunia yangl berdasarkan lkemerdekaan, perdamaian abadil dan keadilanl sosial[[4]](#footnote-4)

Suatu negaral identik dengan Hukum Konstitusi yaitu dengan mengatur organisasi negara[[5]](#footnote-5)dan mengingat bahwa wilayah Indonesia yang sangat luas, Undang-Undang Dasar 1945 beserta perubahannya telah memberikan landasan konstitusional mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, yaitu pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat 2 menjelaskan bahwa adanya pengakuan serta penghormatanl negara terhadapl kesatuan-kesatuanl masyarakat hukuml adat sertal hak-hakl tradisionalnya sepanjangl masih hidupl dan sesuail dengan perkembanganl masyarakat danl prinsip Negaral Kesatuan Republikl Indonesia, dalam pasall 18 ayatl 2 Pemerintahl daerah lprovinsi, daerah lkabupaten, dan kotal mengatur danl mengurus sendiril urusan pemerintahanl menurut asasl otonomi danl tugas perbantuan, satuanl pemerintahan dil bawah pemerintahl pusat yaitul daerah provinsil dan kabupatenl atau kota memilikil urusan yangl bersifat wajibl dan lpilihan.

Pemerintahl Daerah dalaml rangka meningkatkanl efisiensi danl efektifitas penyelenggaraanl otonomi ldaerah, perlu memperhatikanl hubungan antarl susunan pemerintahanl dan antarl pemerintahan ldaerah, potensi dan keanekaragaman daerah[[6]](#footnote-6).

Peraturan tentang Otonomi Daerah tercantum pada Undang- Undang No. 23 Tahun 2014 tepatnyal Pasal 10l ditegaskan Pemerintahl Daerah menyelenggarakanl urusan pemerintahanl yang menjadil kewenangannya, kecualil urusan pemerintahanl yang olehl Undang-Undangl ini ditentukanl menjadi urusanl Pemerintah lPusat. Pemberian otonomil luas kepadal daerah diarahkanl untuk mempercepatl terwujudnya kesejahteraanl masyarakat melaluil peningkatan lpelayanan, pemberdayaan danl peran sertal masyarakat. Dil samping itul melalui otonomil luas, daerahl diharapkan mampul meningkatkan dayal saing denganl memperhatikan prinsipl-prinsip ldemokrasi, pemerataan, lkeadilan, keistimewaan danl kekhususan sertal potensi danl keanekaragaman daerahl dalam sisteml Negara Kesatuanl Republik lIndonesia.

Peningkatan pelayanan terhadap masyarakat diwilayah kesatuan Republik Indonesia perlul dibangun Aparaturl Sipil Negaral yang memilikil integritas, lprofesional, netral danl bebas daril intervensi lpolitik, bersih daril praktek korupsi, kolusil dan nepotisme[[7]](#footnote-7) sertal mampu menyelenggarakanl pelayanan politik bagil masyarakat danl mampu menjalankanl peran sebagail unsur perekatl persatuan danl kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Untuk membentuk aparatur sipil Negara yang tangguh dalam melayani keperluan masyarakat yang berada dibawah wilayahl Negara Kesatuanl Republik lIndonesia, Negara membentuk suatu lembaga yangl disebut Lembaga Administrasi Negara yang merupakan lembagal pemerintah nonl-kementerian yangl diberi kewenanganl melakukan pengkajian danl pendidikan danl pelatihan Aparaturl Sipil Negaral sebagaimana diaturl dalam Undangl Undang yangl mengatur mengenail Aparatur Sipill Negara.

Peraturanl Presiden Nomorl 79 Tahunl 2018 Tentangl Lembaga Administrasil Negara, Pasall 3 mengatakan bahawa Lembaga Administrasil Negara bertugasl meneliti, mengkajil dan melakukanl inovasi manajemenl Aparatur Sipil Negara sesuai denganl kebutuhan lkebijakan, merencanakan dan mengawasi kebutuhan pendidikanl dan pelatihanl Paegawai Aparatur Sipil Negara secara nasional, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta memberikan sertifikat dil bidangnya denganl melibatkan kementrian danl lembaga yang tekait. Selain tugas, Pasal 4 mengatakan bahwa Lembaga Administrasi Negara berfungsi untuk menyelenggarakan pengembangan Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi manajerial Pegawai Aparatur Sipil Negara, melakukan akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara. Lembaga Administrasi Negara juga berwewenang untuk mencabutl izin dalam penyelenggaraanl pendidikan danl pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara yangl melanggar ketentuanl peraturan perundangl-undangan serta mencabutl akreditasi suatu lembagal pendidikan danl pelatihan Pegawail Aparatur Sipil Negara yang tidakl memenuhi standarl akreditasi.

Berkembangnya kemajuanl ilmu lpengetahuan, teknologi sertal perubahan-perubahan yang ada di era globalisasi, instansi pemerintah menuntut pegawainya untuk mengembangkan kemampuan yang dimilikinya[[8]](#footnote-8). Dengan adanya peningkatan kemampuan pegawai khususnya Aparatur Sipil Negara diharapakan tercapainya tujuan pemerintah yang sudah di tetapkan. Pengembangan ini dapat berupa pendidikan atau biasa disebut dengan pelatihan kepemimpinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 tentang pendidikan dan pelatihan jabatan Pegawai Negri Sipil (yang sekarang sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara[[9]](#footnote-9). Dalam peraturan ini pelatihan kepemimpinan merupakan proses dalam penyelenggaraanl belajar mengajarl dalam rangkal meningkatkan kemampuanl Aparatur Sipill Negara (ASN).

Pada awalnya pelatihan kepemimpinan nasional khususnya untuk pejabat struktural tingkat II yang berpedoman pada Peraturanl Kepala Lembagal Administrasi Negaral No. 18 Tahunl 2015 tentangl Pedoman Penyelenggaraanl Pendidikan danl Pelatihan Kepemimpinanl Tingkat lII.

Hasil dari penelitian ini digunakan untuk mempercepat tercapainya visi Negara dalam mengatasi berbagai permasalahan dan isu nasional, tetapi secara bertahap kebutuhan dalam meningkatkan kinerja ASN semakin berkembang. Dengan demikian, Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II yang ditujukan kepada pejabat struktural di instansi tertentu dan di atur dalam Peraturanl Lembaga Administrasil Negara No. 2l Tahun 2019l tentang Pelatihanl Kepemimpinan Nasionall Tingkat lII. Penetapan kebijakanl pembaharuan pada pelatihanl kepemimpinan Tingkat IIl ini denganl mengacu padal pedoman manajemenl dalam penyelenggaraan Pelatihanl Kepemimpinan Tingkatl II yangl tidak hanya memiliki kompetensi, tetapi juga menunjukkan kemampuanl untuk:

1. Membentukl kepemimpinan yangl strategis dalaml rangka menghadapil dinamika llingkungan.
2. Mendorongl perubahan organisasi yangl berdampak bagil organisasi sesuail dengan tanggungl jawab instansinya.

Sasaran dalam kegiatan Pelatihan Kepemimpinan di Pemerintahan Kota Tegal ini ditujukkan kepada Aparaturl Sipil Negaral yang diangkatl oleh pejabatl Pembina kepegawaianl dan diserahil tugas dalaml suatu jabatanl pemerintahan dan memenuhi syarat untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II, yaitu denganl pangkat danl golongan palingl rendah Pembinal (IV/Al) dan telahl menduduki Jabatanl Pimpinan Tinggi Pratama ataul paling rendahl Jabatan Fungsional Ahli lMadya. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa bagi PNSl yang belum mendudukil Jabatan Pimpinanl Tinggi Pratamal harus lulus seleksi yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara yang telah bekerja sama dengan instansi pemerintah. Pelatiham Kepemimpinan Nasional Tingkat II ini sasaran utamakan ditujukan kepada seluruh pejabat struktural terutama pada pejabat struktural eselon II.

Melalui pelatihan kepemimpinan ini pejabat struktural tingkat II dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatannya secara profesional yang dilandasi kepribadian dan etika Aparatur Sipil Negara sesuai kebutuhan instansi[[10]](#footnote-10), selain itu dapat memiliki kesamaan pola pikir yang dinamis yang berorientasi untuk melayani masyarakat. Pemerintahan Daerah KotaTegal telah melaksanakan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II, sebagai berikut:



Berdasarkan datal tabel l1.1 diatasl dapat dilihatl bahwa padal tahun

2019 dan 2021 jumlah pejabat struktural yang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II di Pemerintahan Kota Tegal berjumlah sama, hal ini disebabkan karena pelatihan kepemimpinan nasional tingkat II di tahun 2019 dan tahun 2021 hanya memerlukan 6 orang pejabat sktruktural. Tahun 2020, Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II ditiadakan karena pandemik Covid 19 pada tahun 2020 meningkat signifikan, dan sebagai penggantinya diadakan seleksi terbuka untuk Pejabat Esselon II.

Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II dianggarkan kembali pada tahun 2021 dengan peserta hasil seleksi terbuka tahun 2020. Dengan situasi pandemik Covid-19 sekarang ini untuk mengadakan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II khususnya di Pemerintahan Kota Tegal, pihak Lembaga Administrasi Negara selaku penyelenggara kemudian membuat kebijakan baru dengan mengubah sistem pelatihan kepemimpinan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang telah berkembang untuk menjadi sebuah wadah dalam pelatihan. Perubahan tersebut yang bermula dilakukan secara tatap muka atau bisa disebut dengan pelatihan klasikal, sekarang diubah menjadi pelatihan klasikal dan pelatihan non-klasikal (*e-learning*).

Pelatihan klasikal dilaksanakan dengan peserta diasramakan dan mengadakan kegiatan penunjang, seperti kegiatan jasmani, sedangkan pelatihan non-klasikal dilakukan dengan pembelajaran secara *e-learning*[[11]](#footnote-11). Meskipun dengan adanya perubahan dalam pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II, kegiatan tersebut apat terlaksanal dengan baikl dan sesuail dengan undangl-undang yangl berlaku walaupun muncul kendala-kendala di dalam pelaksanaannya, diantaranya: kendala tempat pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II, kendala sistem, kendala pada pejabat struktural setelah mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkkat II untuk itu setelah diketahui beberapa kendala yang terkait maka adanya sebuah cara mengatasi dalam kendala-kendala yang terdapat di Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II tersebut.

Berdasarkanl uraian latarl belakang masalahl tersebut, makal penulis tertarikl untuk mengetahui danl meneliti lebih lanjut tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II dengan mengambil judul penelitian “Penerapan Peraturan Lembagal Administrasi Negaral No. 2 Tahunl 2019 tentangl Pelatihan Kepemimpinanl Nasional Tingkatl II bagi Aparatur Sipil Negaral di Pemerintahan Kota Tegal.”

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan daril uraian yangl dipaparkan dalaml latar belakangl diatas, makal permasalahan pokok yangl akan diteliti oleh penulis sebagail berikut:

1. Bagaimanal Penerapan Peraturanl Lembaga Administrasil Negara No. 2l Tahun 2019l tentang Pelatihanl Kepemimpinan Nasionall Tingkat IIl bagi Aparatur Sipil Negara di Pemerintahan Kota Tegal?
2. Apal saja kendalal-kendala yangl terjadi dalaml Penerapan Peraturanl Lembaga Administrasil Negara No. 2l Tahun 2019l tentang Pelatihanl Kepemimpinan Nasionall Tingkat IIl bagi Aparatur Sipil Negara di Pemerintahan Kota Tegal?
3. **Tujuan Penelitian**

Sesuail denganl rumusanl masalah telahl diuraikan ldiatas, makal tujuanl yang inginl dicapail dalam penelitianl lini, sebagail berikut:

1. Untukl mengkaji Penerapan Peraturan Lembagal Administrasi Negaral No. 2 Tahunl 2019 tentangl Pelatihan Kepemimpinanl Nasionall Tingkatl IIl bagil Aparatur Sipill Negara dil Pemerintahan Kotal Tegal.
2. Untukl mengetahui kendalal-kendala dalam Penerapan Peraturanl Lembaga Administrasil Negara No 2l Tahun 2019l tentang Pelatihanl Kepemimpinan Nasionall Tingkat IIl bagi Aparatur Sipil Negara di Pemerintahan Kota Tegal.
3. **Manfaat Penelitian**

Hasill dari penelitian inil diharapkan dapatl bermanfaat baik daril segi teoritisl maupun daril segi lpraktis, sebagai lberikut:

1. Secaral Teoritis

Dapat memberikanl saran dalaml ilmu lpengetahuan, khususnya dalam Hukuml Tata Negara terkait Penerapan Peraturanl Lembaga Administrasil Negara No. 2l Tahun 2019l tentang Pelatihanl Kepemimpinan bagi Aparatur Sipil Negara di Pemerintahan Kota Tegal

1. Secara praktis

Dapat menambah referensi terkait Pelatihanl Kepemimpinan Nasionall Tingkat mengenai Penerapan Peraturanl Lembaga Administrasil Negara No. 2l Tahun 2019l tentang Pelatihanl Kepemimpinan Nasionall Tingkat IIl bagi Aparatur Sipil Negara di Pemerintahan Kota Tegal.

1. **Tinjauan Pustaka**

Penelitian terdahulu yakni acuan dari penulis untuk mengkaji peneliitian yang serupa untuk mengetahui perbandingan anatara perbedaanl dan persamaanl penelitian inil dengan penelitianl terdahulu. Adapunl penelitian sebelumnyal yang dapatl dijadukan rujukan dalaml penelitian lini, yaitu:

Jurnal Tinjauan Kebijakan Publik Dan Manajemen Vol.10, No.2 (Indira Amaliasari, Budi Puspo Priyadi, 2021) dengan judul “Implementasi Kebijakan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II melalui *E-Learning* di Lembaga Administrasi Negara”. Penelitian ini membahas tentang perubahan realisasi penyelenggaraan diklat yang sebelumnya tatapl muka (klasikall) menjadi pembelajaranl secara full online. Penelitianl ini menggunakanl metode deskriptifl kualitatif denganl teknik pengumpulanl data melaluil wawancara, lobservasi, dan ldokumentasi. Hasil penelitianl menunjukan bahwa implementasi ke-bijakan penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat IIl melalui *e*l*-learning* dil Lembaga Administrasil Negara beluml terlaksana denganl maksimal.

Jurnal Inovasi Penelitianl Vol. 2, No.1 (Ni Ketut Riani, 2021) dengan Judul “Integritas Kompetensi Dalam Pelatihan Kepemimpinan”

Penelitian ini membahas tentang kurikuluml pelatihan kepemimpinanl ini sudahl mencerminkan integrasil kompetensi yangl dimaksudkan danl bagaimana antisipasi pelaksanaannyal agar tercapail pada akhirl program pelatihanl dapat membentukl perilaku sesuai denganl standar kompetensil yang diharapkanl dengan menggunakan metode kualitatif yangl berupaya memahamil situasi ltertentu, dengan bentukl penelitian studil kasus (*case*l *study*) yaitul suatu penelitianl yang dilakukanl secara lintensif, terinci danl mendalam terhadapl suatu lorganisasi, lembaga ataul gejala tertentul dimana pengumpulan datanya berupa observasi, lwawancara, dokumentasi danl sumber data. Hasil penelitianl ini adalahl strategi integrasil kompetensi adalahl menjabarkan judull materi pelatihanl sebagai Unitl Kompetensi, kedalaml materi pokokl yang disebutl elemen kompetensil dan subl-sub pokokl materi. Keberhasilanl dalam penyusunanl perencanaan terintegrasil akan memudahkanl penyelenggara, fasilitator danl widyaiswara danl peserta pelatihanl dan padal gilirannya dapatl meningkatkan kinerjal pelayanan lpublik.

Jurnal Ketahanan Pangan Vol. 2, No.1 (Affifudin, Suyeno,2018) dengan judul “Pengaruhl Pendidikan danl Pelatihan Kepemimpinanl Tingkat IIl Terhadap Produktivitasl Kepala Dinasl Kesehatan Dil Kota Malangl Jawa lTimur”. Penelitian inil membahas tentang kurangnya profesionalnya sumberl daya manusial dilingkungan pemerintahan Kota Malangl terutama dil Dinas Kesehatanl menjadi kendalal dalam rangkal pencapaian produktivitasl kerja pegawail secara lmaksimal. Penelitian ini menggunakan metode *Explonary Research* dengan teknik pengumpulan data melalui pengujian hipotesis. Hasilnya dari penelitian ini adalah mutu pegawail naik makal produktivitas kinerjal Kepala Dinasl Kesehatan lmenurun, karena prosesl pendidikan danl pelatihan kepemimpinanl tidak dibutuhkanl lagi jikal pegawai sudahl bermutu.

Jurnal Kediklatan Widya Praja Vol. 2, No.1 (Arief Effendy, 2021) dengan judul “Penerapanl Model Blendedl Learninh Pada Pelatihanl Dasar CPNSl Provinsi Jawal Tengah. Penelitianl ini membahas ntuk mengetahuil efektifitas penerapanl model Blendedl Learning padal Pelatihan Dasarl CPNS Provinsil Jawa Tengahl Tahun l2021. Penelitian inil metode yangl digunakan adalahl metode deskriptifl atau metode l pendekatan lkualitatif . Hasilnya Badan Pengembanganl Sumber Dayal Manusia Provinsil Jawa telahl menyelenggerakan Pelatihanl Dasar CPNSl dengan modell Blended Learningl dengan menggunakanl aplikasi SIPl TENAN,  sesuail Peraturan LANl Nomor 1l Tahun 2021l pada pasall 7 ayatl (1) hurufl b. Blendedl Learning dilaksanakanl melalui 3l (tiga) bagianl pembelajaran yaitul pelatihan lmandiri, distance learningl dan pembelajaranl klasikal dil tempat penyelenggaraanl Pelatihan Dasarl CPNS. Selainl itu daril 70 respondenl yang semuanyal peserta Pelatihanl Dasar CPNSl merasa puasl dan menyenangkanl dengan diadakanl pembelajaran modell Blended Learningl pada Pelatihanl Dasar CPNSl Provinsi Jawal Tengah Tahunl 2021. Denganl hasil penelitianl ini makal dapat disimpulkanl bahwa Pelatihanl Dasar CPNSl dengan modell Blended Learningl dapat diterapkanl pada Pelatihanl Dasar CPNSl Tahun 2021l dan sampail Pelatihan Dasarl CPNS tahunl-tahun berikutnyal dan modell Blended Learningl ini berdampakl pada efisiensil anggaran danl juga efektifl dalam lpembelajaran.

Berdasarkan data jurnal diatas dapat diketahui terdapat perbedaan dan relevansi dengan penelitian sekarang. Perbedaan utamanya yaitul terletak padal lokasi lpenelitian, pelaksanaan penelitian inil di Badanl Kepegawaian Pendidikanl dan Pelatihanl Daerah. Penelitian terdahulu yangl telah dipaparkan memiliki kontribusi dalaml penelitian ini antara lain menambah referensi dalam kajian pustaka:



 Sumber: Dikelola Oleh Penulis

1. **Metode Penelitian**
2. Jenisl Penelitian

Penelitianl ini termasuk penelitianl kepustakaan atau *library*l *research* yaitu serangkaianl kegiatan yangl berkenaan denganl metode pengumpulanl data lpustaka, membaca danl mencatat sertal mengolah bahanl penelitian[[12]](#footnote-12) dan *Field* l*Research*, yaitu penelitianl yang bertujuanl untuk mempelajaril secara intensifl tentang latarl belakang keadaanl sekarang danl interaksi lingkunganl suatu unitl sosial baikl individu, lkelompok, lembaga, ataul masyarakat[[13]](#footnote-13). Sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitianl ini yaitu berupa dokumen-dokumen serta buku-bukul yang relevanl dengan permasalahanl penelitian.

1. Pendekatanl Penelitian

Pendekatan dalam penelitian inil menggunakan pendekatanl normatifl empiris mengenail implementasi ketentuanl hukum normatifl (undang-undangl) dalam aksinyal pada setiapl peristiwa hukuml tertentu dalaml suatu masyarakat[[14]](#footnote-14). Bahan- bahanl hukum tersebut terdiril dari buku- buku lhukum, perundangl-undangan, lwawancara, serta bahanl bahan hukum lainnyal yang terkait dalaml penelitian lini.

1. Sumberl Datal

Sumberl data yangl digunakanl dalaml penelitian inil adalahl dengan menggunakan datal primer dan sekunder atau kepustakaan yang mencakup berbagai lbuku, dokumen-dokumenl serta perundangl-undangan yangl terkait dengan permasalahan penelitian lini, sumber datal yang digunakanl dalam penelitianl ini, meliputi:

1. Datal primer, yaitu datal yang diperolehl langsung daril lapangan olehl orang yangl melakukan penelitianl atau yangl bersangkutan memerlukannya[[15]](#footnote-15). Datal ini diperlukanl untuk melakukanl wawancara langsungl kepada Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan serta pegawai-pegawai di Badan Kepegawaianl Pendidikan danl Pelatihan Daerahl Kota Tegal denganl memberikan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan oleh penulis mengenai penelitian yang berjudul “Penerapan Peraturanl Lembaga Administrasil Negara No. 2l Tahun 2019l Tentang Pelatihanl Kepemimpinan Nasionall Tingkat IIl bagi Aparatur Sipil Negara di Pemerintahan Kota Tegal”.
2. Datal sekunder, yaitul data yangl diperoleh ataul dikumpulkan olehl orang yangl melakukan penelitianl dari sumberl-sumber yang telah ada[[16]](#footnote-16). Data sekuner terdiril dari bahanl hukum lprimer, bahan hukuml sekunder danl bahan hukuml tersier, yaitu:
3. Bahanl Hukum Primerl yaitu bahan hukuml yang digunakan untuk mengikatl dan terdiril dari kaidah ataupun normal perundang-undangan, yakni: Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan tentang Otonomi Daerah tercantum pada Undang- Undang No, 23 Tahun 2014, Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Lembaga Administrasi Negara No.2 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II.
4. Bahanl Hukum Sekunderl yaitu bahanl hukum yangl memberikan penjelasanl mengenai bahanl hukum primerl yang diperolehl studi lkepustakaan, bahan ini berupa literaturl-literatur seperti buku-buku maupun dokumen-dokumen yang terkait lpenelitian.
5. Bahanl Hukum lTersier, yaitu bahan hukum yangl memberikan petunjukl serta penjelasan mengenai bahanl hukum lsekunder, bahan ini berupal surat kabar, internet, kamus.
6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan beberapa metode, diantaranya:

1. Sistem *library*l *research* (kepustakaanl) yaitu penelitianl kepustakaan yang dilakukanl melalui data tertulis dengan mengkaji beberapa literatur, peraturan perudang-undangan, jurnal penelitian, serta internet guna menunjang data dalam penelitian ini.
2. Studi Lapangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik wawancara yaitu tanyal jawab secaral lisan dimanal dua orangl atau lebihl berhadapan secaral langsung. Biasanyal komunikasi inil dilakukan dalaml keadaan salingl berhadapan, namunl komunikasi jugal dapat dilaksanakanl melalui telefon[[17]](#footnote-17). Penulisl akan menggunakanl jenis wawancaral tak berstrukturl atau bebasl ataupun yangl bisa disebutl wawancara takl terpimpin. Jenisl wawancara inil tidak perlul mempersiapkan daftarl pertanyaan sebelumnyal dan hanyal menghadapi suatul masalah secaral umum[[18]](#footnote-18). Wawancara ini dilakukan secara langsung kepada penulis dengan Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Pelatiahan di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Tegal.
3. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yang dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati[[19]](#footnote-19). Dalam analisis data yang digunakan oleh penulis dengan cara melakukan analisa terhadap pasal-pasal yang merupakan kaidah hukum, analisis data ini tercantum dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara No.2 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II.

1. **Sistematika Penulisan Skripsi**

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “Penerapan Peraturanl Lembaga Administrasil Negara No.2l Tahun 2019l tentang Pelatihanl Kepemimpinan Nasionall Tingkat IIl bagi Apartur Sipil Negara di Pemerintahan Kota Tegal” akan dimuat sistematika penulisan skripsi. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab yang didalamnya terdapat sub-sub bab dengan susunan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II Tinjauan Konseptual, bab ini memuat tentang teori-teori yang terkait permasalahan pada penelitian dan perundag-undangan sebagai dasar hukum dalam Penerapan Peraturanl Lembaga Administrasil Negara No.2l Tahun 2019l tentang Pelatihanl Kepemimpinan Nasionall Tingkat IIl Bagi Aparatur Sipil Negara di Pemerintahan Kota Tegal.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini memuat tentang hasil penelitian yang terkait permasalahan yaitu tentang Penerapan Peraturanl Lembaga Administrasil Negara No.2l Tahun 2019l tentang Pelatihanl Kepemimpinan Nasionall Tingkat IIl Bagi Aparatur Sipil Negara di Pemerintahan Kota Tegal.

BAB IV Penutupan, bab ini akan memuat kesimpulan serta saran berdasarkan hasil penelitian penulis.

1. Ni’matul Huda, “*Sejarah Ketatanegaraan Indonesia*, *Pilihan atas Federalisme atau Negara Kesatuan*”, Yogyakarta : UII Press, 2004, hlm. 22. [↑](#footnote-ref-1)
2. Soehino, “Ilmu Negara”, Yogyakarta: Liberty, 2000, hlm.224. [↑](#footnote-ref-2)
3. M. Kusnardi, dan Bintan R. Saragih, “*Ilmu Negara*”, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000. hlm. 207 [↑](#footnote-ref-3)
4. Imawan Sugiarto, *HUKUM dan KEBIJAKAN PUBLIK* (Edisi pert), Tanah Air Beta. [http://repository.upstegal.ac.id/3154/2/Hukum dan Kebijakan Publik.pdf](http://repository.upstegal.ac.id/3154/2/Hukum%20dan%20Kebijakan%20Publik.pdf), 2019, diakses pada tanggal 12 Juni 2022 [↑](#footnote-ref-4)
5. Jimmy Assiddiqie, “*Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*”, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI, 2006, hlm.17 [↑](#footnote-ref-5)
6. I Nyoman Gede, *“Hukum Administrasi Negara, Buku Ajar”*, Singaraja: Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti, 2017, hlm.37 [↑](#footnote-ref-6)
7. Elly Fatimah dan Erna Irawati, *“Modul Pelatihan Dasar Calon PNS Manajemen Aparatur Sipil Negara”*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2017, hlm.1 [↑](#footnote-ref-7)
8. Sudarsri, *“Peran Teknologi Dalam Pendidikkan di Era Globalisasi”*, Eduriligia, <https://www.ejournal.unuja.ac.id/index.php/edureligia/article/view/459> diakses pada tanggal 22 Juni 2022 [↑](#footnote-ref-8)
9. Kadrisman, *Manajemen Aparatur Sipil Negara*, Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2018, hlm.158. [↑](#footnote-ref-9)
10. Suhairi, *“Implementasi Pelatihan Diklat ASN Peningkatan Kompetensi SDM Profesional*”, Jurnal Manajemen Pendidikan dan Keislaman, Volume 6, Nomor 2, Juli-Desember 2017, hlm.14 [↑](#footnote-ref-10)
11. Amaliasari, Indira. And Priyadi, Budi Puspo, *“Implementasi Kebijakan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Melalui E-Learning Di Lembaga Administrasi Negara”,* Jurnal Tinjauan Kebijakan Publik dan Manajemen, Volume 10, Nomor 2, 2021 [↑](#footnote-ref-11)
12. Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2003, hlm. 3 [↑](#footnote-ref-12)
13. Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafmdo Persada, Jakarta, 1998, hlm. 22 [↑](#footnote-ref-13)
14. Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 53 [↑](#footnote-ref-14)
15. Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm. 19 [↑](#footnote-ref-15)
16. *Ibid*, hlm. 19 [↑](#footnote-ref-16)
17. S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah),* Jakarta: Bumi Aksara, 2011, Cet. Ke-12, hlm. 113 [↑](#footnote-ref-17)
18. *Ibid*, hlm. 119 [↑](#footnote-ref-18)
19. S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009, hlm. 36 [↑](#footnote-ref-19)